

Tujuan

Selain diklat-diklat non-gelar fungsional JFP dan diklat Non-Gelar linkage Program yang diadakan sesuai jadwal dan tempat yang ditetapkan Pusbindiklatren sebagaimana tertulis dalam halaman-halaman sebelumnya. Serta, mulai tahun 2007, khusus untuk penyelenggaraan diklat Non-gelar substantif, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota juga dapat meminta penyelenggara diklat-diklat non-gelar di luar jadwal dan tempat yang ditetapkan Pusbindiklatren, dengan ketentuan dan prosedur sebagai berikut:

1. Ketentuan:

- Lokasi, jadwal dan waktu diklat ditentukan oleh Pemda Sendiri
- Peserta adalah perencana pemerintah yang berasal dari 1 Propinsi atau 1 Kabupaten atau 1 Kota, dengan jumlah minimal 20 orang
- Atau universitas negeri yang belum memiliki kerjasama dengan Pusbindiklatren, tetapi memiliki kerjasama dengan universitas yang telah memiliki kerjasama dengan Pusbindiklatren dalam penyelenggaraan pelatihan yang dimaksudkan
- Penyelenggara diklat yang ditunjuk oleh Pemda harus Universitas yang telah mempunyai ikatan kerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas.
- Atau terdiri dari beberapa Prop/Kab/Kota/Dep/LPND yang dikordinir oleh satu Pemda/Dep/LPND yang mengusulkan, dengan jumlah peserta 20 orang
- Pusbindiklatren hanya akan membiayai fixed cost (tuition fee), sedangkan variable cost (penginapan, makan, uang saku, transport peserta dll) dibiayai oleh Pemda.

2. Prosedur

- Pemda mengajukan surat usulan kepada Pusbindiklatren dengan menyertakan: (1) jenis diklat, jadwal, nama peserta, Universitas penyelenggara diklat, dan lokasi diklat yang diinginkan, (2) kesanggupan Pemda menanggung biaya variable, (3) Surat Penunjukan Universitas penyelenggara diklat disertai dengan kesanggupan Universitas menyelenggarakan diklat dimaksud.
- Apabila Pusbindiklatren setuju, maka Pusbindiklatren akan: (1) membuat kesepakatan dengan Pemda untuk penyelenggaraan diklat dimaksud, (2) meminta Universitas yang ditunjuk untuk mengajukan proposal teknis dan biaya, untuk kemudian dievaluasi oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pusbindiklatren Bappenas, (3) menandatangani kontrak dengan Universitas yang ditunjuk (4) melakukan pembukaan diklat dan monitoring penyelenggaraan diklat tersebut.
- Persetujuan Pusbindiklatren akan sangat tergantung dari ketersediaan dana dalam tahun anggaran berjalan untuk porsi *cost sharing*

3. Jenis Diklat untuk Partially Funded

- Perencanaan Pembangunan Daerah

- Perencanaan Tata Ruang
- Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Pesisir
- Perencanaan Investasi Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Program dan Proyek
- Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri
- Penilaian Angka Kredit
- Administrasi Penilaian Angka Kredit
- Pembangunan Infrastruktur Melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta, Level 1

4. Jadwal

- Pendaftaran : Januari -Juli tahun yang sedang berjalan
- Proses Persetujuan: Maret -Agustus tahun yangsedang berjalan

Tujuan

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kemampuan serta ketrampilan staf perencana dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

1. **Jangka Waktu**
4 minggu (192 Jam Pelajaran)
2. **Syarat Peserta Diklat**
 - Berpendidikan minimal S1;
 - Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
 - Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
 - Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"
3. **Alamat/Lokasi Diklat:** (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren) FE- UNAND, LPEM-FE UI, FIA-UNIBRAW, PSKMP-UNHAS
4. **Jadwal Diklat dan Seleksi**
 - Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
 - Pelaksanaan : Sesuai Permintaan
5. **Pengaturan Pembiayaan**
Pembiayaan dilakukan melalui skema cost sharing tipe IV

Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):

- Biaya pelatihan/*tuition fee*.

Ditanggung Instansi Pengirim

- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
- Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
- Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
- Penginapan dan makan selama diklat;
- Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah
- Perencanaan Proyek
- Kebijakan Program, Pembiayaan dan Penganggaran
- Permasalahan Dalam Perencanaan: Implementasi, Kegagalan Rencana dan Government Failure

ANALISIS POTENSI DAN KEBUTUHAN DAERAH

- Analisis PDRB
- Sumber Daya Daerah
- Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Daerah
- Hubungan Antar Daerah:
- Globalisasi dan Dampaknya terhadap Pembangunan Daerah
- Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Lokal Economic Development
- Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah

BEBERAPA INDIKATOR DAN TEKNIK PERENCANAAN MAKRO DAERAH

- Landasan Kuantitatif dalam Perencanaan
- Analytical Hierarchy Process
- Elastisitas dan Kegunannya dalam Perencanaan
- Indikator Pembangunan Daerah
- Participatory Rural Appraisal
- Pengantar Model Makro Ekonomi Daerah dan Proyeksi Ekonomi Daerah.

PERENCANAAN SEKTORAL & REGIONAL

- Perencanaan Sektoral
- Perencanaan Regional

STUDI LAPANGAN DAN LATIHAN

Tujuan

Memberikan bekal pengetahuan aparat daerah untuk membuat suatu kebijakan yang memungkinkan investor untuk datang dan menanamkan modalnya sehingga mampu melaksanakan tugasnya berdasarkan urutan-urutan dengan berpedoman pada materi pelatihan dan diterapkannya dalam kebijakan di daerah mereka masing-masing.

1. Jangka Waktu

2 minggu (96 Jam Pelajaran).

2. Syarat Peserta Diklat

- Berpendidikan minimal S1;
- Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
- Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
- Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"

3. Alamat/Lokasi Diklat: (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren)

FE- UNAND, LPEM-FE UI, MAP-UGM, PSKMP-UNHAS

4. Jadwal Diklat dan Seleksi

- Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
- Pelaksanaan : Sesuai Permintaan

5. Pengaturan Pembiayaan

Pembiayaan dilakukan melalui skema cost sharing tipe IV

Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):

- Biaya pelatihan/*tuition fee*.

Ditanggung Instansi Pengirim

- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
- Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
- Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
- Penginapan dan makan selama diklat;
- Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

- Ekonomi global dan tata ekonomi nasional dan daerah serta ekonomi makro.
- Liberalisasi Perdagangan Kawasan Regional.
- Problem dan Prospek perekonomian Indonesia serta sumber-sumber pembiayaan.
- Indikator Pembangunan.
- Reformasi Birokrasi dan Manajemen Kebijakan publik untuk investasi.
- Spirit Entrepreneurship dalam Birokrasi
- Manajemen kemitraan dalam rangka investasi.
- Kebijakan perbankan untuk mendukung investasi.
- Pengembangan potensi daerah dalam rangka investasi.
- Teknik dan Metode pengukuran Komoditas Unggulan.
- Perencanaan Berbasis Kinerja. Akuntabilitas kinerja organisasi public.
- Kebijakan pertanahan dalam RTRW dalam kerangka Investasi.
- Penjelasan Action Plan di Bidang Investasi.
- Kebijakan dan Strategi Pengembangan Investasi
- Legal dan administrative daerah untuk administrasi.
- Sistem informasi manajemen untuk investasi.
- Manajemen pajak dan retribusi untuk investasi.
- Marketing dan public relation untuk investasi.
- Peranan BKPM dalam investasi.
- Alternatif Pengembangan Usaha Ekonomi dalam Kerangka Investasi dan pengembangan ekonomi lokal.
- Otonomi Daerah dan Pengembangan Investasi.
- Latihan

Tujuan

Memahami dan mampu melaksanakan proses penyusunan rencana tata ruang melalui kajian teoritis dan konseptual, penerapan metoda dan teknik serta melakukan latihan (*exercise*) perencanaan.

Pemahaman ini diharapkan dapat direplikasikan dan diimplementasikan ke dalam perencanaan tata ruang di tempat tugasnya masing-masing.

1. **Jangka Waktu**
4 minggu (192 Jam Pelajaran).
2. **Syarat Peserta Diklat**
 - Berpendidikan minimal S1;
 - Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
 - Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
 - Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"
3. **Alamat/Lokasi Diklat:** (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren) KP2WK-ITB dan MPKD-UGM
4. **Jadwal Diklat dan Seleksi**
 - Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
 - Pelaksanaan : Sesuai Permintaan

5. Pengaturan Pembiayaan Pembiayaan dilakukan melalui skema cost sharing tipe IV

Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):

- Biaya pelatihan/*tuition fee*.

Ditanggung Instansi Pengirim

- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
- Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
- Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
- Penginapan dan makan selama diklat;
- Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

BAGIAN I

- Ruang, Keruangan dan Struktur Keruangan.
- Konsep kesesuaian dan Kemampuan Ruang.
- Proses Perencanaan dan Sistem Rencana Spasial.
- Teknik Perpetaan Untuk Perencanaan Spasial.
- Dasar dan Teknik Pengolahan Data Spasial.
- Teknik Survey Perencanaan Spasial Kota dan Wilayah.
- Teknik Analisis Perencanaan Spasial.

BAGIAN II

- Konsep Ekonomi Spasial : Kota & Wilayah.
- Dasar-Dasar Perencanaan Perumahan.
- Dasar-Dasar Perencanaan Prasarana Kawasan.
- Analisis Fisik Ruang (Teknik Analisis Ruang II).
- Analisis Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Spasial.
- Analisis Perencanaan Prasarana Kawasan.

BAGIAN III

- Perencanaan Spasial Kawasan-Kawasan Khusus Wilayah.
- Aspek Spasial dalam Investasi Kegiatan Usaha/Bisnis.
- Manajemen Kawasan : Dasar-dasar & Praktek.
- Konsep dan Teknik Perencanaan Program Daerah
- Analisis Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran.
- Analisis Ekonomi Perkotaan dan Wilayah.
- Analisis Kapasitas dan Perencanaan Layanan Kota.

STUDI LAPANGAN DAN LATIHAN

Tujuan

Membantu mengatasi masalah kurangnya staf perencana yang berkualitas di tingkat Propinsi/ Kabupaten/Kota dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar anggota staf Bappeda dan dinas-dinas terkait lainnya di seluruh Indonesia di bidang perencanaan.

1. Jangka Waktu

2 minggu (96 Jam Pelajaran)

2. Syarat Peserta Diklat

- Berpendidikan minimal S1;
- Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
- Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
- Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"

3. **Alamat/Lokasi Diklat:** (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren)
FE-UNAND, LPEM-FE UI, FIA-UNIBRAW, PSKMP-UNHAS

4. Jadwal Diklat dan Seleksi

- Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
- Pelaksanaan : Sesuai Permintaan

5. Pengaturan Pembiayaan

Pembiayaan dilakukan melalui skema cost sharing tipe IV

Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):

- Biaya pelatihan/*tuition fee*.

Ditanggung Instansi Pengirim

- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
- Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
- Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
- Penginapan dan makan selama diklat;
- Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

- Pemantauan dan Evaluasi.
- Sistem Pemantauan dan Evaluasi dalam Hierarki Manajemen
- Pandangan Manajemen Proyek Mengenai Evaluasi.
- Sistem Informasi Manajemen Pemantauan
- Jaringan Kerja untuk Pemantauan Anggaran dan Keuangan Proyek.
- Perencanaan Program dan Proyek.
- Pengawasan dan Pengendalian Proyek di Indonesia.
- Anggaran Kinerja dan Aplikasinya di Indonesia.
- Evaluasi Kinerja Program-Proyek Pembangunan di Indonesia.
- Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Latihan Pemantauan dan Evaluasi Program & Proyek

DIKLAT PERENCANAAN KELAUTAN DAN PESISIR

Tujuan

Untuk memberi landasan awal dalam memahami berbagai masalah dan problem wilayah pesisir dan model-model pendekatan perencanaan yang dapat diimplementasikan

1. Jangka Waktu

4 minggu (192 Jam Pelajaran)

2. Syarat Peserta Diklat

- Berpendidikan minimal S1;
- Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
- Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
- Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"

3. Alamat/Lokasi Diklat: (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren) PSKMP-UNSYIAH/LPPM-ITB/PSKMP-UHAS/MPKD-UGM**4. Jadwal Diklat dan Seleksi**

- Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
- Pelaksanaan : Sesuai Permintaan

5. Pengaturan Pembiayaan

Pembiayaan dilakukan melalui skema cost sharing tipe IV

Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):

- Biaya pelatihan/*tuition fee*.

Ditanggung Instansi Pengirim

- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
- Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
- Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
- Penginapan dan makan selama diklat;
- Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

KARAKTERISTIK, ISU, DAN PROBLEM DI WILAYAH PESISIR

- Pengertian wilayah pesisir
- Ekosistem wilayah pesisir, kegunaan dan kerentanan
- Budaya Maritim
- Ragam Potensi Kawasan Pesisir dan Kelautan
- Konflik Kepentingan Multi Pengguna Ruang/Lahan di Pesisir
- Gangguan, dan Kerusakan Akibat Kegiatan Manusia/Lingkungan Binaan
- Fragmentasi dan Konflik Kewenangan Berbagai Entitas Pengelola SDA, dan Kawasan Wilayah Pesisir

PENDEKATAN TEKNIK PERENCANAAN, DAN PENGELOLAAN

- Pengertian dan Konsep Perencanaan, dan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terintegrasi
- Penggunaan GIS dalam Perencanaan, dan Pengelolaan Wilayah Pesisir
- Penyusunan dan Pengembangan Profil Lingkungan Pesisir
- Penilaian Ekonomi dan Analisis Sumber Daya Pesisir
- Penilaian Dampak Lingkungan
- Model Kontekstual Proses Perencanaan Wilayah Pesisir : Integrated Planning, Strategic Planning, Participatory, Planning
- Model Substantif Proses Perencanaan Wilayah Pesisir : Perencanaan Tata Ruang, Perencanaan Sosial, Perencanaan Infrastruktur, Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- Resolusi dan Media Konflik
- Prasarat Kelembagaan dan Hukum dalam Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan.
- Instrumen Perundang-undangan dan Mekanisme Pasar dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Kelautan.
- Zonasi (Pemintakatan) dan Kriteria Baku Mutu Lingkungan
- Peran Masyarakat serta Lembaga Lokal dalam Perencanaan dan Pengelolaan Pesisir
- Teknik Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian.

PENDALAMAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN BEBERAPA KOMPONEN TERTENTU WILAYAH PESISIR

- Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
- Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Kasus)
- Pengelolaan Sumber Daya Mangrove (Kasus)
- Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang • Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pesisir/Pantai (Kasus)
- Pengembangan Ekonomi Wilayah Pesisir Berbasis Sumber Daya Lokal dan Masyarakat (Kasus)

LATIHAN

Tujuan

Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan aparatur perencana di daerah dalam melakukan perencanaan hibah dan pinjaman luar negeri (PHLN) untuk membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing.

1. **Jangka Waktu**

2 minggu (96 Jam Pelajaran)

2. **Syarat Peserta Diklat**

- Berpendidikan minimal S1;
- Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
- Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
- Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"

3. **Alamat/Lokasi Diklat:** (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren) FE-UNAND, LPEM-FE UI, FIA-UNIBRAW, PSKMP-UNHAS4. **Jadwal Diklat dan Seleksi**

- Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
- Pelaksanaan : Sesuai Permintaan

5. **Pengaturan Pembiayaan**

Pembiayaan dilakukan melalui skema cost sharing tipe IV

Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):

- Biaya pelatihan/*tuition fee*.

Ditanggung Instansi Pengirim

- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
- Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
- Biaya lain di luar biaya yang ditanggung

Kurikulum/Mata Kuliah

- Kebijakan Penerimaan Pembangunan dan Hibah/Pinjaman Luar Negeri
- Siklus Proyek Pembangunan Luar Negeri
- Perencanaan dan Penganggaran Proyek Hibah/pinjaman Luar Negeri
- Teknis Negosiasi
- Penyusunan Kontrak Negosiasi
- Penyusunan Persyaratan Umum dan Spesifikasi Teknis Hibah/Pinjaman Luar Negeri
- Prosedur Pencarian dana Hibah/Pinjaman Luar Negeri
- Pedoman Pengadaan Barang dan jasa Hibah/ Pinjaman Luar Negeri
- Pedoman Akuntansi dan Audit Hibah/Pinjaman Luar Negeri
- Evaluasi Kinerja Hibah/Pinjaman Luar Negeri
- Latihan

Tujuan

Untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan perencana pusat dan daerah dalam menyusun anggaran yang berbasis kinerja.

1. **Jangka Waktu**
2 minggu (96 Jam Pelajaran)
2. **Syarat Peserta Diklat**
 - Berpendidikan minimal S1;
 - Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
 - Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
 - Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"
3. **Alamat/Lokasi Diklat:** (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren) FE-UNAND, LPEM-FE UI, MAPUGM, PSKMP-UNHAS
4. **Jadwal Diklat dan Seleksi**
 - Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
 - Pelaksanaan : Sesuai Permintaan
5. **Pengaturan Pembiayaan**
Pembiayaan dilakukan melalui skema cost sharing tipe IV

**Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):
Ditanggung Instansi Pengirim**

- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
- Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
- Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
- Penginapan dan makan selama diklat;
- Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

- A. **PERENCANAAN DAERAH**
 - Akuntabilitas Pemerintah Daerah
 - Identifikasi Potensi Daerah
 - Arah dan Kebijakan Umum
 - Penjaringan Aspirasi Masyarakat
 - Skala Prioritas
 - Perencanaan strategis
 - Keterkaitan Dokumen Perencanaan
- B. **KEUANGAN DAERAH (APBD)**
 - Struktur APBD
 - Konsep Dasar APBN dan APBD
 - Manajemen Pengeluaran Publik
 - Kebijakan Penganggaran dan Anggaran Kinerja
 - Analisis APBD (Kinerja Keuangan Daerah)
 - Penyusunan Perhitungan dan Perubahan APBD
 - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- C. **KEUANGAN DAERAH (APBD)**
 - Sistem Akuntanis Keuangan daerah
 - Penyusunan Program dan Kegiatan
 - Penyusunan RASK dan DASK
 - Pentatausahaan Keuangan Daerah
 - Pengawasan Keuangan Daerah
- D. **DISKUSI DAN LATIHAN
APLIKASI ANGGARAN KINERJA**

Tujuan

Memberikan wawasan dan teknik perencanaan kepada para peserta diklat mengenai bagaimana melakukan perencanaan pembangunan sosial dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda

- 1. Jangka Waktu**
2 minggu (60 – 100 Jam pelajaran)
- 2. Syarat Peserta Diklat**
 - Berpendidikan minimal S1;
 - Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
 - Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
 - Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"
- 3. Alamat/Lokasi Diklat:** (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren) FE-UNAND, LPEM-FE UI, MAPUGM, PSKMP-UNHAS
- 4. Jadwal Diklat dan Seleksi**
 - Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
 - Pelaksanaan : Sesuai Permintaan
- 5. Pengaturan Pembiayaan dilakukan dengan skema CS IV**
Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):
 - Biaya pelatihan/*tuition fee*.**Ditanggung Instansi Pengirim**
 - Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
 - Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
 - Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
 - Penginapan dan makan selama diklat;
 - Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

Pembangunan Sosial Budaya

Pengembangan Modal Sosial Dalam Perencanaan Pembangunan Sosial

- Konsep Pembangunan Yang berbasis Rakyat
- Sasaran dan Pengukuran Indikator Pembangunan Sosial Dalam Perencanaan Sosial
- Potensi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan Sosial

Strategic Social Planning

- Analisis Situasi Sosial
- Perencanaan Sosial Strategis
- Monitoring dan Evaluasi
- Indikator Pembangunan Sosial dan Metode Riset Kebijakan Sosial

Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar

- Analisa Situasi Pendidikan
- Identifikasi dan Analisis Masalah Pendidikan di Tingkat Perencanaan
- Penentuan Prioritas Masalah Pendidikan

Indikator Dinamika Sosial

- Indikator Sosial BPS
- Indikator Sosial UNDP dan Bank Dunia
- Indikator Sosial Lembaga Internasional

Latihan

Tujuan

Memberikan pemahaman dan ketrampilan bagi peserta untuk dapat menyusun perencanaan dan kebijakan transportasi di wilayahnya masing-masing.

1. **Jangka Waktu**
2 minggu (\pm 88 Jam Pelajaran)
 2. **Syarat Peserta Diklat**
 - Berpendidikan minimal S1;
 - Diusulkan oleh Pejabat Kepegawaian instansi yang bersangkutan minimal Eselon II;
 - Umur setinggi-tingginya 50 tahun;
 - Memenuhi ketentuan lain sesuai dengan "Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat Perencanaan dan Pelaksanaan JFP"
 3. **Alamat/Lokasi Diklat:** (Universitas yang sudah bekerjasama dengan Pusbindiklatren) U
 4. **Jadwal Diklat dan Seleksi**
 - Pendaftaran: Sampai dengan Mei 2007
 - Pelaksanaan : Sesuai Permintaan
 5. **Pengaturan Pembiayaan dilakukan dengan skema CS IV**
- Biaya yang Ditanggung Pusbindiklatren (sesuai Harga Satuan Umum/HSU 2006):**
- Biaya pelatihan/*tuition fee*.
- Ditanggung Instansi Pengirim**
- Perjalanan p.p dari kota asal instansi peserta ke kota tempat diklat;
 - Uang saku, karena biaya hari libur tidak ditanggung Pusbindiklatren dan alokasi biaya HSU yang dirasakan kecil.
 - Biaya lain di luar biaya yang ditanggung Pusbindiklatren
 - Penginapan dan makan selama diklat;
 - Transpor lokal selama diklat (kecuali hari libur/Sabtu/Minggu, tidak ditanggung);

Kurikulum/Mata Kuliah

Pengenalan PerencanaanTransportasi

- Pengenalan Sistem Transportasi Nasional dan Wilayah
- Pengenalan Karakteristik masing-masing Moda Transportasi
- Pengenalan Sistem Transportasi Antarmoda Terpadu

Transportasi Perkotaan Dan Wilayah

- Tujuan & Identifikasi Proses Perencanaan Transportasi
- Indetifikasi kewenangan dan kewajiban Stakeholder
- Cara Identifikasi Kebutuhan Pelayanan Transportasi
- Cara Analisis dan Evaluasi Strategi Alternatif
- Perencanaan Kebijakan, Program dan Proyek Pembangunan
- Proses Perencanaan Berkelanjutan
- Sistem Monitoring dan kondisi dan kinerja transportasi
- Perencanaan Transportasi dan Masalah Tata Guna Lahan dan Pengembangan Wilayah

Dasar-Dasar Pendekatan Teknik Perencanaan Dan Kebijakan Transportasi

- Prinsip Dasar Analisis Peramalan Permintaan Transportasi (Forecasting dan Demand Analysis)
- Prinsip Dasar Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi
- Pricing Policy, Financing dan TDM (Traffic Demand Management)
- Regulasi

Peran Transportasi Dalam Pembangunan Nasional dan Wilayah

- Peran Pembangunan Transportasi dalam Berbagai Aspek Pembangunan Nasional
- Peran Pembangunan Transportasi dalam Berbagai Aspek Pembangunan Nasional

Pengenalan Perencanaan Transportasi Nasional Sektoral (Moda Dan Antar Moda)

- Peran Pembangunan Transportasi dalam Pem bangunan Nasional/Daerah